

**PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
DI KECAMATAN SOLOKAN JERUK**

***THE EFFECT OF CONTROL ON THE EFFECTIVENESS OF
PROTECTION OF FOOD FARMLAND FUNCTION IN SOLOKAN
JERUK SUB-DISTRICT***

Arnia Fajarwati¹, Candra Garnida Gandi²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Langlangbuana Bandung

¹arnia.fajarwati@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan penelitian belum efektifnya perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Berdasarkan permasalahan tersebut dirumuskan masalah “Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung”. Untuk menganalisis masalah, digunakan teori langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007: 245) yaitu pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, dan pengendalian kekecualian. Adapun hipotesis yang diajukan yaitu: “Besarnya pengaruh pengendalian terhadap efektivitas alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung ditentukan oleh langkah-langkah pengendalian melalui Pengendalian langsung, Pengendalian tidak langsung, dan Pengendalian berdasarkan kekecualian”. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah *ex post facto*, sedangkan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Angket, dan Wawancara, dan Teknik *Simple Random Sampling*, Analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik Statistik Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengendalian, Efektivitas, Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan

ABSTRACT

*The research problem is the ineffectiveness of the protection of the conversion of agricultural land for food in the Solokan Jeruk District, Bandung Regency. Based on these problems, the problem is formulated "How much influence control affects the effectiveness of sustainable food agricultural land protection from the transfer of land functions into industrial land in Solokan Jeruk Sub-district of Bandung Regency". To analyze the problem, the theory of control measures proposed by Hasibuan (2007: 245) is used, namely direct control, indirect control, and exception control. The hypothesis proposed is: "The magnitude of the control effect on the effectiveness of land conversion for sustainable food agriculture in Solokan Jeruk District, Bandung Regency is determined by control measures through direct control, indirect control, and control based on exceptions". The research method used in this research is *ex post facto*, while the data collection techniques are through observation, questionnaires, and interviews, and simple random sampling*

technique. The analysis in this study used the simple linear regression statistical technique. The results of the study concluded that direct control, indirect control and control based on exceptions had a positive and significant effect on the effectiveness of the protection of land conversion for sustainable food agriculture.

Keywords: *Control, Effectiveness, Transfer of Agricultural Land*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian petani, oleh karena itu maka lahan pertanian menjadi faktor produksi yang penting. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, membuat sektor swasta banyak mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan industri. Desakan kebutuhan lahan untuk pembangunan begitu kuat, sementara luas lahan tidak bertambah atau terbatas. Selama ini lahan pertanian mempunyai nilai lahan yang rendah dibanding peruntukan lahan lain (non pertanian), akibatnya lahan pertanian secara terus menerus akan mengalami konversi lahan ke non pertanian, padahal lahan pertanian (sawah) selain mempunyai nilai ekonomi sebagai penyangga kebutuhan pangan, juga berfungsi ekologi seperti mengatur tata air, penyerapan karbon di udara dan sebagainya (Hariyanto, 2010)

Indonesia mempunyai lahan pertanian pangan yang sangat luas yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin habis karena semakin banyaknya pihak swasta yang mengalih fungsikan lahan pertanian pangan menjadi lahan pabrik-pabrik tanpa menyisakan lahan pertanian pangan.

Alih fungsi lahan menurut undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa: “Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.”

Alih fungsi lahan pertanian sawah ini sendiri tentunya akan berdampak baik ataupun buruknya pada masa mendatang. Secara garis besar alih fungsi lahan ini tentunya akan mengganggu ketersediaan pangan untuk masyarakat. Lingkup kecilnya sendiri alih fungsi lahan dapat berakibat kepada petani yang kehilangan lapangan pekerjaan. Para petani yang tadinya dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri mereka menjadi harus membeli. Selain itu, para petani tidak lagi memiliki pekerjaan, yang akan berakibat lagi terhadap perekonomian yang tidak stabil di daerah tersebut. Alih fungsi lahan sudah sejak lama menjadi masalah, khususnya di Jawa Barat.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Bandung No.1 Tahun 2019 BAB 1 pasal 1 ayat (7) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjelaskan bahwa: “Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.”

Data perubahan lahan pertanian tahun 2017-2018 berdasarkan Desa di

Kecamatan Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung yakni:

Tabel 1
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Tahun 2017-2018 Berdasarkan Desa-Desa di Kecamatan Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung

Desa	Tahun 2017 Pertanian Pangan (Ha)	Tahun 2018 Pertanian Pangan (Ha)	Perubahan Menjadi Lahan Industri dan Lain Lain (Ha)
Panyadap	142,60	59,10	83,5
Padamukti	56,10	34	22,1
Cibodas	142,70	82,50	60,2
Langensari	712,50	711,70	0,8
Solokan Jeruk	1016,50	881,60	134,9
Ranca Kasumba	45,60	37,65	7,95
Bojong Emas	29,80	28,52	1,28

Sumber:Kecamatan Solokan Jeruk 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan terbesar adalah terdapat pada di Kecamatan Solokan Jeruk sudah melebihi batas normal.

1.2 Perumusan Masalah

“Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari alih fungsi lahan menjadi lahan industri di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.”

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage to man*. Kata *manage* berarti mengatur atau mengelola, sedangkan kata *man* berarti manusia, kalau dua kata tersebut digabungkan, manajemen berarti

mengelola atau mengatur manusia Karyoto (2015:1). Fungsi-fungsi Manajemen terdiri atas 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu:

1. *Planning* (fungsi perencanaan)

Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer dalam fungsi perencanaan harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan karena ini adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam perusahaan kedepannya. Fungsi manajemen yang lain tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang.

2. *Organizing* (fungsi pengorganisasian)

Organizing (fungsi pengorganisasian) adalah pengaturan sumber daya manusia

dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat, tugas dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

3. *Actuating / Directing* (pengarahan)

Directing alias fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Beberapa kegiatan pada fungsi pengarahan:

- a) Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien
- b) Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan
- c) Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan

4. *Controlling* (pengendalian)

Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan.

2.2 Pengendalian

Pengendalian adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi tertentu dengan perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar prestasi, menentukan apakah terjadi penyimpangan dan mengukur apakah penyimpangan tersebut berarti, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara

yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam melakukan proses pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan suatu organisasi perlu memperhatikan serta melaksanakan asas-asas dari pengendalian itu, yang merupakan unsur mendasar dari pengendalian agar pelaksanaan kerja mengarah kepada tercapainya tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Salah satu konsep yang dipergunakan dalam secara empirik dengan mengaplikasikan cara-cara pengendalian sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2007: 245) yaitu:

1. Pengendalian langsung adalah pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manager. Manager memeriksa pekerjaan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.
2. Pengendalian tidak langsung adalah pengendalian jarak jauh artinya dengan melalui laporan yang diberikan bawahan. Pelaporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah tercapai.
3. Pengendalian berdasarkan kekecualian, adalah pengendalian yang di khsuskan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang di harapkan.

2.3 Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “padajalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengansarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran

Pengendalian adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi tertentu dengan perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar prestasi,

menentukan apakah terjadi penyimpangan dan mengukur apakah penyimpangan tersebut berarti, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Salah satu konsep yang dipergunakan dalam pemecahan masalah penelitian, peneliti mencoba untuk menganalisis secara empirik dengan mengaplikasikan cara-cara pengendalian sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2007: 245) yaitu:

1. Pengendalian langsung adalah pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manager. Manager memeriksa pekerjaan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.
2. Pengendalian tidak langsung adalah pengendalian jarak jauh artinya dengan melalui laporan yang diberikan bawahan. Pelaporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah tercapai.
3. Pengendalian berdasarkan kekecualian, adalah pengendalian yang di khsuskan untuk kesalaan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang di harapkan.

Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Mengacu pada dimensi efektivitas diatas memperlihatkan bahwa efektivitas merupakan suatu acuan atau tolak ukur yang digunakan dalam mencapai tujuan berdasarkan pada alternatif dan direkomendasikan untuk memberikan hasil yang maksimal berhubungan dengan sejauh mana sasaran yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dengan demikian ketiga dimensi tersebut oleh peneliti di aplikasikan kedalam hasil penelitian sebagai landasan teori dalam memecahkan masalah yang akan diteliti.

Dari berbagai pengetahuan di atas selanjutnya peneliti mengemukakan batasan konsep sebagai berikut

1. Pengendalian adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi tertentu dengan perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar prestasi, menentukan apakah terjadi penyimpangan dan mengukur apakah penyimpangan tersebut berarti, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Agar pelaksanaan pengendalian dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan maka baiknya menggunakan unsur-unsur pengendalian yakni:
 - a) Pengendalian langsung
 - b) Pengendalian tidak langsung
 - c) Pengendalian berdasarkan kekecualian
3. Dinas pertanian merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, dinas pertanian juga merupakan salah satu unsur pelaksana yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga

diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

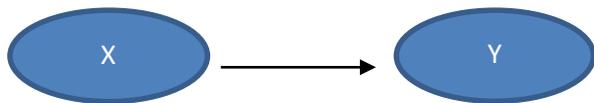
2.4.2 Hipotesis

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut: Besarnya pengaruh pengendalian terhadap efektivitas alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung ditentukan oleh unsur-unsur pengendalian melalui Pengendalian langsung, Pengendalian tidak langsung, dan Pengendalian berdasarkan kekecualian

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah *ex post facto* Sugiyono (2010: 7) mengemukakan bahwa penelitian *ex post facto* adalah satu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel penelitian ini. Untuk melihat hubungan antara variabel *dependent* dan *independent* dirancang konstelasi variabel sebagai berikut:

Gambar 3.1
Desain Penelitian



Sumber: Sugiyono (2010: 7)

Keterangan:

X : Pengendalian

Y : Efektivitas Efektivitas Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan observasi, angket yang disebarkan pada para responden yang terlibat dalam Efektivitas Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, dan wawancara dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan para petani di Kecamatan Solokan Jeruk.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Kesimpulan Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana dari kedua variable yaitu variabel bebas pengaruh pengendalian (Variable X) dan variable terikat atau efektivitas (Variabel Y). Hasilnya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengendalian terhadap efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung memiliki hubungan sebesar 0,669 pada taraf uji $\alpha = 0,05$ dan menurut Sugiyono (2007 :184) angka ini menunjukkan pengaruh atau korelasi yang kuat.

Dari hasil perhitungan Koefisien Determinasi (r^2) dapat dikatakan bahwa pengaruh pengendalian terhadap efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung sebesar 52,7% dan sisanya 48,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam konteks penelitian ini tidak diteliti oleh peneliti.

Adapun epsilon atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yakni sebesar 48,3% merupakan partisipasi masyarakat, dimana partisipasi masyarakat mengacu pada keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan atau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Mulyasa : 2004).

Berdasarkan hasil uji signifikansi (uji - F) memperlihatkan nilai $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ oleh karena itu penelitian ini dapat diterima secara empirik atau H_1 diterima dan H_0 ditolak.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data, rumusan masalah dan hipotesis yang telah terbukti kebenarannya maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

Variabel bebas, berdasarkan analisis skor dari variabel pengaruh pengendalian setelah dibandingkan dengan nilai skor ideal yang ditetapkan maka didapatkan hasil termasuk dalam kategori cukup baik.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian cukup baik namun belum optimal dilaksanakan. Ukuran dalam efektivitas perlindungan

alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung ditarik melalui 3 dimensi yang menjadi langkah – langkah penentu keberhasilan pengendalian. Pengendalian ini dapat dinilai oleh pegawai atau aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan tokoh masyarakat kelompok tani di Kecamatan Solokan Jeruk. Dimensi dalam pengendalian tersebut yakni terdiri dari

1. Pengendalian Langsung adalah pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manager. Manager memeriksa pekerjaan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam hal ini aparatur Dinas Pertanian mengambil beberapa langkah yang ditargetkan akan meningkatkan efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Langkah tersebut diantaranya :

- a) Terjadwalnya peninjauan langsung ke lapangan secara periodik. Langkah pertama yakni terjadwalnya peninjauan langsung ke lapangan secara periodik, berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pertanian bahwa jadwal peninjauan langsung ke lapangan belum dilakukan secara periodik. Namun setidaknya dalam satu bulan sekali pasti dilakukan peninjauan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi

peneliti di lapangan terlihat bahwa belum optimalnya penjadwalan peninjauan langsung ke lapangan secara periodic yang dilakukan oleh petugas bagian seksi pengendalian Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, karena terkadang dalam satu bulan tidak pernah dilakukan peninjauan sama sekali. Dan maksimal peninjauan yang dilakukan hanya satu kali dalam satu bulan.

- b) Adanya peninjauan langsung ke lapangan yang tidak terjadwal (on the spot). Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pertanian bahwa peninjauan langsung ke lapangan yang tidak terjadwal (on the spot) dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada seperti misalnya kebutuhan yang mendadak atau adanya permintaan langsung dari atasan. Sehingga peninjauan tersebut dilakukan tanpa adanya jadwal yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa jarang sekali diadakan peninjauan langsung ke lapangan yang tidak terjadwal (on the spot) yang dilakukan oleh aparatur, karena peninjauan langsung ke lapangan yang tidak terjadwal (on the spot) hanya dilakukan apabila ada permintaan langsung dari atasan atau Kepala Dinas terkait ataupun

situasi dan kondisi yang mengharuskan hal tersebut dilakukan.

2. Pengendalian Tidak Langsung adalah pengendalian jarak jauh artinya dengan melalui laporan yang diberikan bawahan. Pelaporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah tercapai. Dalam hal ini aparatur Dinas Pertanian mengambil beberapa langkah yang ditargetkan akan meningkatkan efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Langkah tersebut diantaranya :

- a) Adanya pembuatan laporan kemajuan program perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pertanian bahwa belum adanya laporan yang dibuat oleh petugas mengenai progress (kemajuan) program perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dibuat secara periodik, dikarenakan belum adanya keharusan atau instruksi yang mengharuskan hal tersebut dilakukan. Laporan pun dibuat berdasarkan inisiatif petugas sendiri sebagai bukti capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Karena laporan yang dibuat oleh petugas hanya berdasarkan peninjauan yang

telah dilakukan, dan tidak secara periodik dibuat berdasarkan kemajuan atau progress nya. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa laporan kemajuan program perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini belum secara continue dibuat tetapi hanya setiap kali petugas telah melaksanakan peninjauan saja. Sehingga tidak terdapat laporan yang tersusun secara sistematis mengenai kemajuan program perlindungan alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan dari awal program dilaksanakan sampai saat ini.

- b) Pemberian sanksi bagi aparatur yang memberikan izin alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pertanian bahwa dalam pemberian sanksi bagi aparatur yang memberikan izin alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak langsung diberikan hukuman pidana namun petugas diberikan kesempatan untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan tersebut dan diberikan surat peringatan atas kesalahan yang diperbuat, setelah itu diberikan sanksi berupa skors atau pemberhentian bekerja untuk sementara selama beberapa hari atau dalam waktu yang

sudah ditentukan, dan maksimal waktu tersebut adalah selama satu bulan. Apabila petugas mengulangi kesalahan yang sama maka akan dilakukan pemecatan jabatan dan pemberhentian kerja secara tidak hormat kepada petugas yang bersangkutan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa petugas tidak langsung menerima hukuman pidana atas kesalahan yang telah dilakukan, namun pada setiap kesalahan yang telah dilakukan petugas selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut terlebih dahulu sementara untuk sanksi yang diberikan hanya sebatas pemberian peringatan dan pemberian skors kerja tanpa adanya pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Pengendalian Kekecualian adalah pengendalian yang di khususkan untuk kesalaan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang di harapkan. Dalam hal ini aparaturnya Dinas Pertanian mengambil beberapa langkah yang ditargetkan akan meningkatkan efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Langkah tersebut diantaranya :
 - a) Adanya kebijakan pengalihan fungsi lahan berdasarkan

kondisi fisik lahan berupa kesuburan tanah pertanian dan gangguan hama. Berdasarkan wawancara dengan aparaturnya Dinas Pertanian bahwa petugas tidak akan memberikan izin alih fungsi lahan pertanian dengan mudah apabila kondisi lahan pertanian sudah tidak subur lagi dan berhubungan dengan kondisi fisik lahan pertanian lainnya. Karena hal tersebut masih bisa diupayakan, misalkan apabila kondisi tanah sudah tidak subur lagi maka petugas akan mengupayakan hal tersebut bisa dengan memberikan obat, pupuk dan lain sebagainya. Ataupun kondisi fisik tanah yang tandus maka petugas akan memberikan solusi berupa pengairan yang cukup dan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk mengurus saluran air atau irigasi agar lancar dan membuat kontur tanah gembur kembali dengan pengairan yang baik. Selain itu belum adanya kebijaksanaan yang diberlakukan untuk melakukan pengalih fungsian lahan pertanian menjadi lahan industri apabila lahan pertanian terganggu oleh hama, karena gangguan hama bersifat sementara dan tidak continue setiap waktunya hanya berdasarkan musiman, maka tidak ada alasan bagi petugas untuk memberikan suatu kebijaksanaan atas hal tersebut. Namun petugas lebih

mengusahakan untuk memecahkan masalahnya dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi gangguan hama tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa petugas belum sepenuhnya mengupayakan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah yang dimaksudkan seperti memperbaiki kesuburan tanah dengan berbagai upaya yang dilakukan ataupun memperbaiki saluran pengairan lahan pertanian. Petugas belum sepenuhnya terjun ke lapangan dalam membasmi hama dan memberikan solusi kepada pemilik lahan pertanian yang merugi akibat serangan hama pada lahannya. Hal tersebut membuat pemilik lahan kebanyakan ingin mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan industri karena kurangnya respon dari petugas dalam menganggulangi hal tersebut.

- b) Adanya kebijaksanaan alih fungsi lahan pertanian yang disebabkan oleh kepentingan negara. Berdasarkan wawancara dengan aparaturnya Dinas Pertanian bahwa adanya kebijaksanaan alih fungsi lahan pertanian yang disebabkan oleh kepentingan negara selalu dipatuhi oleh petugas Dinas Pertanian seperti kebijakan alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol, kereta cepat dan lain

sebagainya yang merupakan tugas dari pemerintah pusat akan selalu diutamakan. Dan dalam pelaksanaannya petugas selalu memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para petani agar petani mengerti dan mengalih fungsikan lahan berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun epsilon dalam penelitian ini yakni partisipasi masyarakat. Ukuran mengenai partisipasi masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada teori (Mulyasa : 2004), dimana partisipasi masyarakat mengacu pada keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan atau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai,

Berdasarkan wawancara dengan para petani bahwa kurang produktifnya pertanian yang menyebabkan minimnya perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung ini, dikarenakan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya aparaturnya Dinas Pertanian kepada petani. Pembinaan tersebut seharusnya gencar dilakukan oleh pemerintah agar mendorong produktifnya hasil pertanian pangan para petani, agar petani lebih mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Namun kenyataannya pemerintah sangat tidak optimal dalam melaksanakan pembinaan yang seharusnya dilakukan, sehingga kebanyakan petani kurang produktif dalam mengelola lahan mereka selain itu juga kurang tanggapnya

aparatur dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para petani seperti contoh pemerintah lamban dalam memecahkan permasalahan faktor penyebab gagal nya panen para petani.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian kekcualian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

Hasil pengujian hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa variabel pengendalian memiliki hubungan yang bersifat kuat dan signifikan yang berarti bahwa pada taraf kepercayaan yang dipilih, hasil penelitian kebenarannya dapat ditolerir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin dipenuhi unsur unsur variabel penendalian maka akan semakin tinggi efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan teruji secara empirik.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh variabel pengendalian dan erpsilon dari penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dan pembinaan dari pemerintah terkait alih fungsi lahan.

5.2 Saran

disampaikan kepada Seksi Pengendalian Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pengendalian langsung berupa kegiatan peninjauan untuk lebih terencana dan dilakukan secara konsisten dan periodik sehingga mendapatkan suatu informasi yang konkret dan berkesinambungan. Serta selalu mengadakan peninjauan yang tidak terjadwal (on the spot) agar dapat mengetahui situasi atau keadaan di lapangan secara konkret dan mendalam.
2. Dalam melaksanakan pengendalian tidak langsung berupa pembuatan laporan untuk senantiasa dibuat secara sistematis dan periodik sebagai salah satu bahan atau referensi yang menggambarkan sejauh mana perlindungan alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan sudah dilaksanakan. Serta untuk tegas dalam memberikan sanksi kepada aparatur yang sudah melanggar perturan yang berlaku.
3. Senantiasa memberikan pembinaan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para petani dalam hal peralihan fungsi lahan pertanian padi agar dapat diterima oleh semua pihak dan tidak melanggar peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, A. 1992. Ilmu Usaha Tani. Cetakan ke-III. Alumni. Bandung
- Agung, Jakarta.Poerwadarminta, W.J.S. 1990.*Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Arief Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1996.
- Arif, Saiful Nur dan Iskandar Zulkarnain. "Dasar-dasar manajemen dalam teknologi informasi." *Jurnal* Vol.5, No.2., 2008.
- Azhar Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia
- Azhar, Susanto. 2010. *Sistem Informasi 1, Pendekatan Normal Praktiuka Penyusunan Metode dan Prosedur*, Edisi 5, Bandung : Lingga Jaya.
- Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Budiarjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Dunia, Firdaus A dan Abdullah, Wasilah. 2009, " *Akuntansi Biaya*", Edisi kedua. Salemba Empat: Jakarta
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Hall, James A, 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Keempat, Buku Satu, diterjemahkan: Dewi Fitriyani dan Deny Arnos. Salemba Empat: Jakarta
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Harold Koontz and Cyrill O'donell dalam buku *Nanang Fattah* (2007:175)
- Hery, 2016, *Analisis Laporan Keuangan*: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Iqbal, M dan Sumaryanto, 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 167-182. Bogor.
- Karyoto. (2016). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mahmud M. Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), hlm. 202
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Mulyasa, E. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Rodya Karya
- Murniningtyas E. 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru Jilid I dan II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*
- Rodjak, Abdul. 2006. *Manajemen Usahatani*. Bandung: Pustaka Giratuna.
- Sastraatmadja. 1993. *Penyuluhan Pertanian*. Alumni. Bandung
- Sedarmayanti. (2006). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung. Mandar Maju
- Sihaloho, Martua. 2004. *Konversi lahan pertanian dan perubahan struktur*

- agrarian. (Tesis) Sekolah Pascasarjana. Instusi Pertanian Bogor, Bogor.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sondang P. Siagian masih dalam buku *Nanang Fattah* (2007:176)
- Steers, Richard.M.(1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku* (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga.
- Stoner, Janes A.F., Freeman, R. Edward. 1996. *Manajemen. (Alih Bahasa Sindoro)*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sujamto. 2003, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Jakrta, Graha Indonesia Edisi Revisi*
- Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019
- Jurnal Dampak Alih Fungsi lahan Terhadap Ketahanan Pangan
- Jurnal Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Pertanian dan Kedaulatan Pangan
- <https://distan.bandungkab.go.id/selayang-pandang> (Diakses pada tanggal 9 Februari 2020)
- <https://bandungkab.bps.go.id> (Diakses pada tanggal 20 Februari 2020)